

**IMPLEMENTASI PROGRAM KEBERSIHAN PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(STUDI KASUS KOTA TALUK KUANTAN TAHUN 2024)**

SKRIPSI

**Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial
Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Administrasi Negara**



Disusun Oleh :

HERA VIQULU HANI

NPM : 210411030

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM KEBERSIHAN PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUAPTEN
KUANTAN SINGINGI
NAMA : HERA VIQULU HANI
NPM : 210411030
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
JURUSAN : S1 ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I


SARJAN M. S. Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

PEMBIMBING II


SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi


EMILY EMBARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 12
Bulan : Juni
Tahun : 2025

Tim Penguji

KETUA


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SEKRETARIS


SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

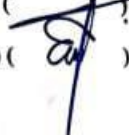
1. SARJAN M, S.Sos., M.Si

(Pembimbing I) ()

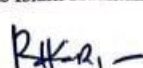
2. DESRIADI, S.Sos., M.Si

(Anggota Penguji I) ()

3. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si

(Anggota Penguji II) ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERA VIQULU HANI

NPM : 210411030

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelarak AdemiK (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain, telah saya tulis sumbernya dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada pelaksanaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, Mei 2025



HERA VIQULU HANI
NPM. 210411030

MOTTO

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah pena kut dan bimbang.

Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”

(Andrew Jackson)

"Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi
manusia yang berguna"

(Albert Einstein)

"Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan
memudahkan baginya jalan ke surga"

(Hadits Riwayat Imam Muslim)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan selalu dalam lindungan-Nya. Semoga ini menjadi salah satu langkah untuk menuju kesuksesan dan meraih cita-cita besar saya.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk malaikat tanpa sayapku yaitu Ayah (Asep Budi Oktavera) dan Ibuku tercinta (Puryanti), yang selalu memberiku semangat dan memanjatkan do'a kepada putrimu dalam tiap sujudnya. Terimakasih untuk Ayah dan Ibu pengorbananmu sungguh luar biasa.

Serta untuk Adik-adikku (Elvia Kurnia Ningsih, Chika Khalida dan Rayan Arsyaka) yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada kakak mu ini.

Untuk sahabatku yang selalu ada dibelakangku (Mita Aprilia dan Alfa Deana) terimakasih kalian selalu ada untukku, semangat dari kalian tak akan mungkin aku lupakan sampai kapanpun itu. Terimakasih juga kepada oarang-oarang terdekat yang selalu mendukung hingga sampai saat ini.

Terimakasih banyak untu Bapak **Sarjan M, S.Sos.,M.Si** dan Bapak **Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si** yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan bantuan dalam proses bimbingan. Dan kepada Bapak dan ibu Dosen pengajar serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Univertitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memebrikan tambahan ilmu, bantuan administrasi, dan bantuan lainnya dalam kelancaran studi penelitian.

Terimakasih banyak untuk semuanya karena jasa kalian sangat berharga bagi saya. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa berguna dimasa yang akan datang, Amin.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KEBERSIHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Hera Viqulu Hani

NPM : 210411030

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan yang ditemukan adalah masih terdapat program yang dilaksanakan tetapi belum lancar dalam pelaksanaan dan menjalankan program-program tersebut. Seperti masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, padahal sudah disediakan tempat pembuangan sampah. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Informasi terdiri dari 9 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan empat komponen yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi program kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup terimplementasi. Meskipun berbagai fasilitas dan program telah disediakan, seperti tempat pembuangan sampah dan sosialisasi kepada masyarakat, kenyataannya masih banyak ditemukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan masih rendah.

Kata kunci : *Implementasi, Program Kebersihan*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE CLEANING PROGRAM IN THE KUANTAN SINGINGI DISTRICT ENVIRONMENTAL OFFICE

Hera Viqulu Hani
NPM: 210411030

This suggested aims to determine the implementation of the cleanliness program at the Kuantan Singingi Regency Environmental Service. The problem found is that there are still programs being implemented but the implementation and implementation of these programs are not yet smooth. As there are still many people who throw rubbish carelessly, even though rubbish dump sites have been provided. This research method is descriptive research with a qualitative approach. Qualitative descriptive research is research that aims to describe and describe events and phenomena that occur in the field and present data systematically, factually and accurately regarding facts or phenomena that occur in the field. Information consists of 8 people. Data collection was carried out using observation, interviews and documentation techniques. The research uses source triangulation to check the validity of the research data. Data analysis in this research uses four components consisting of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the study conducted through observation, interviews, and documentation, it can be concluded that the implementation of the cleanliness program at the Kuantan Singingi Regency Environmental Service has been implemented sufficiently. Although various facilities and programs have been provided, such as waste disposal sites and socialization to the community, in reality there are still many people who litter. This shows that the level of public awareness of the importance of environmental cleanliness is still low.

Keywords: Implementation, Cleanliness Program

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puja dan puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah mengajarkan manusia dengan qalam (pena) dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sehingga manusia dapat hidup dengan cahaya ilmu dan pengetahuan. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan mendidik umatnya dengan ilmu dan akhlak menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Proposal ini disusun sebagai salah satu tugas akademis di Universitas Islam Kuantan Singingi dalam rangka mencapai gelar S.Sos. Dalam penyusunan proposal ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan moril maupun materil. Adapun ucapan terima kasih khususnya penulis sampaikan kepada:

1. Ibuk Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.i., M.Pd.i selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu Rika Ramadanti, S.Ip.,M.Si., selaku Dekan Universitas Islam Kuantan Singingi beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan nasehat, arahan, dan kemudahan dalam penyusunan proposal ini serta rekomendasinya untuk melakukan penelitian.
4. Bapak Sarjan.M, S.Sos.,M.Si., dan Bapak Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus atas keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan serta motivasi kepada penulis.
5. Kepada para dosen Program Studi Administrasi Negara yang telah mendidik dan membimbing selama kuliah di Universitas Islam Kuantan Singingi.

6. Yang paling utama penulis banyak haturkan terima kasih tak terhingga kepada ayahanda dan ibunda serta Adik-Adik ku tercinta yang tak henti-hentinya memberikan motivasi serta do'a yang tulus bagi keberhasilan penulis dalam mengukir kehidupan yang bermanfaat. Dan khususnya untuk teman-teman seperjuangan kami di Jurusan Administrasi Negara, atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Tak lupa penulis juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan proposal ini terdapat hal yang kurang berkenan. Penulis hanya dapat mendo'akan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dengan tulus dalam penyusunan skripsi ini semoga amal shalih yang akan dibalas oleh Allah SWT. Dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca sekalian.

Teluk Kuantan, 14 Mei 2025

Hera Viqulu Hani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.1.1 Teori/konsep Administrasi Negara	6
2.1.2 Teori/Konsep Organisasi dan Prilaku Organisasi.....	9
2.1.3 Teori/Konsep Kebijakan Publik.....	18
2.1.4 Teori/Konsep Masyarakat Kota dan Penataan Kota	23
2.1.5 Teori/Konsep Lingkungan Hidup	28
2.1.6 Teori/Konsep Otonomi Daerah.....	29
2.2 Kerangka Pemikiran	32
2.3 Hipotesis Kerja	32
2.4 Defenisi Operasional	32
2.5 Operasional Variabel	34
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Informan Penelitian	44
3.3 Sumber Data Penelitian	44
3.3.1 Data Primer	44

3.3.2 Data Sekunder.....	45
3.4 Fokus Penelitian	46
3.5 Lokasi Penelitian	46
3.6 Metode Pengumpulan Data	46
3.6.1 Observasi	46
3.6.2 Wawancara.....	47
3.6.3 Dokumentasi	47
3.7 Metode Analisi Data.....	47
3.7.1 Pengumpulan Data.....	48
3.7.2 Reduksi Data.....	48
3.7.3 Penyajian Data	48
3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian	49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	50
4.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Kuantan Singingi	50
4.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Kuantan Singingi	51
4.2.1 Visi.....	51
4.2.2 Misi	51
4.3 Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.....	52
4.3.1 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.....	52
4.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.....	54
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
5.1 Identitas Informan	Error! Bookmark not defined.
5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin ...	Error! Bookmark not defined.
5.1.2 Informan Menurut Kelompok Umur	Error! Bookmark not defined.
5.1.3 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikannya ...	Error! Bookmark not defined.

5.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian Tentang Implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi	Error! Bookmark not defined.
5.2.1 Indikator Komunikasi	Error! Bookmark not defined.
5.2.2 Indikator Sumber Daya	Error! Bookmark not defined.
5.2.3 Indikator Disposisi	Error! Bookmark not defined.
5.2.4 Indikator Struktur Birokrasi	Error! Bookmark not defined.
5.3 Analisis Penelitian Implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi	Error! Bookmark not defined.
5.3.1 Indikator Komunikasi	Error! Bookmark not defined.
5.3.2 Indikator Sumber Daya	Error! Bookmark not defined.
5.3.3 Indikator Disposisi	Error! Bookmark not defined.
5.3.4 Indikator Struktur Birokrasi	Error! Bookmark not defined.
BAB VI PENUTUP	103
6.1 Kesimpulan.....	103
6.2 Saran	104
DOKUMENTASI	105
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Operasional Variabel.....	34
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	44
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	49
Tabel 4.1 Susunan Organisasi Dinas lingkungan Hidup Habupaten Kuantan Singingi.....	45
Tabel 5.1 Identitas Informan Penelitian Implementas Program Kebersihan pada Dinas lingkungan Hidup Habupaten Kuantan Singingi.....	66
Tabel 5.2 Identitas Informan Penelitian Implementas Program Kebersihan pada Dinas lingkungan Hidup Habupaten Kuantan Singingi.....	66
Tabel 5.3 Identitas Informan Penelitian Implementas Program Kebersihan pada Dinas lingkungan Hidup Habupaten Kuantan Singingi.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan hHdup Kabupaten Kuantan Singingi.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan sampah tidak lepas dari adanya aktivitas manusia diberbagai sektor. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Masyarakat masih beranggapan bahwa sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, sehingga banyak yang membuang sampah tanpa dikelola dengan baik yang mengakibatkan timbulnya pencemaran. Sampai saat ini permasalahan sampah belum ditangani dengan baik.

Semakin bertambahnya penduduk indonesia yang diiringi dengan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume sampah dan jenis sampah yang beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan atau yang sulit diurai oleh proses alam. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan bau yang tidak sedap, mengurangi tingkat kesuburan tanah dan menghambat sirkulasi tanah, serta menghambat aliran air.

Pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pengelolaan sampah yang kurang baik, berdampak buruk pula bagi kesehatan, sehingga peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga pemerintahan sangat penting dalam mengelola sampah agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Selain peran Dinas Lingkungan Hidup, peran masyarakat juga diperlukan dalam mengurangi dan mengelola sampah. Perlu diingat bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemerintah

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan dan menunjang hidup rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup. Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan berkelanjutan, memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam yang sesuai dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.

Salah satu faktor penghambat dalam penanganan sampah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan mengelola sampah. Banyak pula masyarakat yang enggan membuangnya ke tempat sampah, tetapi justru membuangnya ke sungai atau di pinggir jalan. Hal ini tentu saja berpengaruh pada baku mutu air, karena air sungai menjadi sumber Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam distribusi air bersih di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, kebiasaan membuang sampah ke drainase menyebabkan tersumbatnya aliran air sehingga apabila hujan akan terjadi banjir, maka diperlukan penataan ulang drainase dan menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan.

Permasalahan lingkungan hidup di kabupaten kuantan singingi semakin lama semakin kompleks dan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Permasalahan lingkungan hidup tersebut antara lain kebakaran hutan dan lahan, potensi bencana alam seperti banjir, penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas udara, timbunan sampah dan limbah B3, permasalahan lain yang bersifat global, adalah perubahan iklim

(*climate change*), efek rumah kaca (*green house effect*) dan penipisan ozon (*ozone depletion*).

Berbagai permasalahan lingkungan hidup diatas telah menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup padahal lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan hak asasi setiap anggota masyarakat di kabupaten kuantan singingi.

Dalam rangka mengatasi hal-hal tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi perlu menyusun rencana strategi yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama sama antara pimpinan untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran sesuai tugas pokok, fungsi kewenangan secara efektif, efisien, dan produktif.

Berdasarkan pengamatan peneliti ditemukan beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan program kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kuantan Singingi masih terdapat program yang dilaksanakan tetapi belum lancar dalam pelaksanaan dan menjalankan program-program tersebut. Seperti masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, padahal sudah disediakan tempat pembuangan sampah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya banjir. Misalkan saat musim hujan seperti sekarang ini, selokan tidak bisa lagi menampung air karena tersumbat oleh sampah dan mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa lokasi. Terutama di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang sekaligus juga melatar belakangi penulisan untuk menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul

“Implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah **“Implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus Kota Teluk Kuantan)”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum lingkungan pada khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi:

1.4.2.1 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai bahan masukan untuk membuat suatu Peraturan Daerah guna meningkatkan pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

1.4.2.2 Dinas Lingkungan Hidup, sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan penanganan dan pengelolaan kebersihan khususnya dalam hal sampah.

- a. Masyarakat, sebagai bahan informasi untuk memperluas wawasan mengenai hukum lingkungan, sehingga diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar dan berperan aktif dalam menjaga dan mengelola lingkungan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori/konsep Administrasi Negara

Ilmu administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari tentang proses dinamika kerjasama manusia. Kerja sama merupakan gejala yang sifatnya universal dan sudah ada dan berlangsung sejak jaman primitif sampai jaman modern. Administrasi dalam arti luas merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerangka kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi merupakan sesuatu yang bersifat universal jadi ia ada dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri, hal itu disebabkan karena administrasi dapat dijumpai pada setiap aspek kehidupan (ekonomi, sosial, politik dsb). Karena begitu luasnya bidang administrasi sampaisampai 'Robert Prethus' mengatakan bahwa tidak ada ilmu sosial yang lebih luas cakupannya dibandingkan dengan ilmu administrasi.

Administrasi merupakan salah satu sarana untuk melayani kebutuhan manusia. Administrasi yang baik adalah administrasi yang didasarkan asas-asas yang berlaku secara umum, sehingga dapat diterima semua pihak baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi tersebut. Dengan administrasi manusia dapat lebih mudah mencapai tujuan hidupnya yang lebih baik, karena ilmu administrasi adalah ilmu yang mempelajari proses kegiatan manusia yang dilakukan secara kerja sama.

Administrasi secara teoritik adalah merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaannya satu dengan konsep Negara hukum atau muncul secara bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan Negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu. Meski demikian hukum administrasi Negara. Sebagai suatu cabang ilmu hukum, Administrasi Negara merupakan bidang hukum yang relatif mudah, Diakui bahwa hukum Administrasi Negara lebih luas dari pada istilah-istilah lainnya, hal ini karena dalam istilah administrasi Negara tercakup tata usaha Negara.

Administrasi pemerintah daerah, terdiri dari 3 kata yaitu administrasi, pemerintah dandaerah. Administrasi dapat diartikan dalam 2 hal yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Secara sempit administrasi diartikan sebagai kegiatan yang bersifat tulis menulis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi, jadi kegiatan yang dimaksud tidak lebih dari kegiatan tata usaha. Seperti mengetik, mengirim surat, mencatat keluar dan masuk surat, penyimpanan arsip dan yang termasuk pada proses pelayanan lainnya.

Sedangkan administrasi dalam arti luas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kegiatan-kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dalam pengertian luas ini, pengertian tata usaha termasuk didalamnya. Administrasi yang dimaksud tidak hanya pada badan-badan pemerintah saja, tetapi juga terdapat pada badan-badan swasta. Kemudian, kita masuk dalam pengertian administrasi pemerintah. Pada hakekatnya administrasi pemerintah adalah administrasi "negara dalam arti sempit. Administrasi "negara dalam arti luas sebagai obyeknya adalah "negara

lengkap dengan badan-badan "negara baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit yang menjadi obyek adalah pemerintah. Administrasi pemerintah berhubungan dengan kegiatan pemerintahan yang dapat dikelompokkan dalam 3 fungsi kegiatan dasar yaitu & perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas administrasi, penggunaan dinamika administrasi.

Secara global, Administrasi pemerintahan merupakan Instrument Yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat, dan pada sisi lain Hukum Administrasi Pemerintahan merupakan Hukum yang memperoleh perlindungan dari pemerintah. Jadi, Hukum Administrasi Pemerintahan membuat peraturan mengenai aktivitas pemerintahan. Hukum Administrasi Pemerintahan meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan Administrasi. Administrasi bersamaan dengan pemerintahan.

Dalam UU AP mengatur hubungan antara badan atau pejabat administrasi pemerintahan dan masyarakat dalam wilayah hukum publik. UU AP meniscayakan adanya peraturan yang jelas terhadap tertib administrasi pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan seperti mengatur tentang kewenangan, jenis jenis keputusan, sistem dan pengujian keputusan, sanksi administrative dan lain sebagainya. UU AP menjadi landasan bagi peradilan tata usaha Negara dalam menguji sengketa hukum tata usaha Negara² Perkataan pemerintahan dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif, artinya pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan, yang bukan orang dan fungsi pembuatan undang-undang pemerintahan. Hukum Administrasi Pemerintahan atau Hukum

tata pemerintahan berisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Namun tidak semua peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum termasuk dalam cakupan Hukum Administrasi Pemerintahan sebab ada peraturan yang menyangkut pemerintahan umum, tetapi tidak termasuk dalam Hukum Administrasi Pemerintahan melainkan masuk pada lingkup Hukum tata Negara.

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi dan Prilaku Organisasi

Dalam buku Malayu S.P. Hasibuan, (2014: 24-25), terdapat kutipan pengertian organisasi sebagai berikut. Louis A. Allen: “Organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan”. James D. Mooney: “Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia, untuk mencapai tujuan bersama”.

Pradjudi Atmosudiro (2014 : 121) mengemukakan bahwa organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Aspek-aspek penting dari definisi di atas adalah:

1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai
2. Adanya sistem kerja sama yang berstruktur dari sekelompok orang
3. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antara sesama karyawan
4. Adanya penempatan orang-orang dan alat-alat organisasi

Adapun unsur-unsur organisasi, yaitu:

1. Manusia (*human factor*), artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang di pimpin (bawahan).
2. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada, jika ada tempat kedudukannya.
3. Tujuan, artinya organisasi baru ada, jika ada tujuan yang ingin dicapai.
4. Pekerjaan, artinya organisasi itu baru ada, jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagisn pekerjaan.
5. Struktur, artinya organisasi itu baru ada, jika ada hubungan dan kerja sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya.
6. Teknologi, artinya organiasi itu baru ada, jika terdapat unsur teknis
7. Lingkungan, artinya organisasi baru ada, jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi misalnya ada sistem kerja sama sosial.

Penetapan hubungan dalam suatu organisasi merupakan salah satu syarat terciptanya kerja sama (*team work*) antara karyawan dengan karyawan, dan antara departemen dan departemen.

Hubungan-hubungan ini dalam suatu organisasi dapat digolongkan atas:

1. *Line relations* (hubungan lini)
2. *Functional relations* (hubungan fungsional)
3. *Staff relations* (hubungan staf)
4. *Coordination relations* (hubungan koordinasi)

Sejak lahir sampai meninggal manusia, sadar atau tidak, kita menjadi anggota dari suatu atau bebrapa kelompok sosial. Begitu kita lahir kita menjadi anggota baru dari satu kelompok keluarga, suami istri dan anak,

atau ayah, ibu dan kakak-kakak. Memasuki sekolah, kita menjadi anggota dari kelompok kelas di sekolah. Disamping itu mungkin kita memasuki perkumpulan tari, perkumpulan olahraga, kelompok diskusi sekolah, dan sebagainya. Memasuki dunia perkerjaan, sebagai tenaga kerja, kita menjadi anggota dari kelompok kerja kita, disamping menjadi anggota dari perkumpulan-perkumpulan yang berkaitan dengan minat kita (olahraga, kesenian, dan sebagainya), dengan tempat tinggal kita (rukun tetangga, desa dan sebagainya), dengan keahlian dan profesi kita masing-masing. Dalam setiap kelompok dimana kita menjadi anggota, kita memainkan peran yang berbeda-beda, sebagai ayah, suami, istri, ketua, bendahara, anggota, karyawan, kepala bagian dan seterusnya dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, (Daulay F, 2016 : 63).

Secara singkat manusia tergabung mulai dari organisasi genetis (keluarga), organisasi rukun tetangga, rukun warga, organisasi masyarakat, organisasi sekolah (pendidikan), organisasi negara hingga organisasi dunia. Bahkan struktur fisik manusia sendiri sesungguhnya adalah suatu sistem yang tersusun dari sub-sistem anggota tubuh yang semuanya sebagai suatu sistem tubuh yang memiliki fungsi masing-masing dan terorganisasi secara sempurna hingga menghasilkan sosok manusia yang sempurna. Karena hal tersebut manusia diberikan banyak julukan atau istilah oleh para ahli ada yang memberi julukan *homo socius* (Makhluk Sosial), ada yang memberi nama *homo laden* (makhluk bekerja), ada juga yang menjuluki *homo symbolicum* (makhluk yang suka menggunakan lambang-lambang), makhluk organisasional, *homo homini socius* (sosok manusia sebagai makhluk individu,

tapi pada saat bersamaan manusia sebagai kawan sosial bagi manusia lainnya), bahkan sebaliknya ada juga yang menjuluki *homo homini lupus* (manusia sebagai serigala bagi manusia yang lain), dan istilah lainnya.

Sejatinya keberadaan organisasi memang diciptakan untuk kepentingan manusia. Mau tidak mau, manusia harus bisa mengatur, mengelola, dan mengembangkan organisasi yang ada tersebut, baik dalam skala yang paling kecil sampai organisasi dalam skala yang besar sekalipun. Dari sinilah perlunya pengorganisasian sebagai sebuah ilmu atau sebagai sebuah seni dalam melakukan pengelolaan organisasi tersebut dibutuhkan serta diperlukan oleh manusia itu sendiri. (Rachman, 2015 : 56).

Keberadaan organisasi dalam skala yang kecil akan memberikan dampaknya efek yang kecil pula, begitu pula sebaliknya. Keberadaan organisasi dalam lintas budaya juga akan menjadi suatu tantangan bagi anggota organisasi tersebut dalam mengelola serta mengembangkan organisasi untuk mencapai dari tujuan organisasi tersebut. Tak terlepas bagi kita yang tinggal di Indonesia, dengan latar belakang budaya yang majemuk dan plural, tantangan tersebut tidak dapat kita hindari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa, dan ada 718 bahasa berdasarkan Data Pokok Kebahasaan dan Kesusasteraan, Kemdikbud RI. Sebagai Negara yang berpenduduk mayoritas Islam, Indonesia juga merupakan negara dengan berpenduduk muslim terbesar didunia, sehingga tidak dapat kita pungkiri bahwa hal tersebut baik secara langsung ataupun tidak akan memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial kita sebagai manusia, tak terlepas juga

akan memberikan pengaruh pada bentuk, model, dan sistem organisasi yang ada di Indonesia. Dalam melaksanakan suatu kegiatan organisasi sebaiknya prinsip organisasi yaitu: pembagian kerja (*devision of work*), wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*), disiplin (*discipline*), kesatuan komando (*unity of command*), kesatuan langkah (*unity of direction*), subordinasi minat dibawah minat pada umumnya (*subordination of individual interest to general interest*), pemberian hadiah (*remuneration*), sentralisasi atau pemusatan (*centralization*), jenjang hirarki (*line of auctority/hierarchie*), ketertiban (*order*), kesamarataan (*equity*), stabilitas jabatan pegawai (*stability of personel*), inisiatif (*iniciative*) dan kesatuan jiwa korps (*esprit de corps*) dilaksanakan untuk suatu proses organisasi yang bermutu.

Bentuk organisasi sering disamakan dengan macam organisasi, padahal keduanya berbeda. Bentuk organisasi memandang dari segi tata hubungan, wewenang, dan tanggung jawab yang ada dalam suatu organisasi. Wursanto menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk organisasi yaitu:

1. Bentuk organisasi staff (*staff organization*), dimana dalam organisasi staf hanya terdapat pucuk pimpinan dan staf yang memberikan bantuan pemikiran berupa saran atau nasihat kepada pucuk pimpinan. Oleh karena itu, dalam organisasi staf tidak ada garis komando kebawah karena tidak ada pejabat pimpinan lini.
2. Bentuk organisasi lini (*line organization*), dimana bentuk organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi dimana pucuk pimpinan dipandang sebagai

sumber kekuasaan tunggal. Segala ketentuan, keputusan, atau segala kebijaksanaan ada di tangan satu orang, yaitu pucuk pimpinan.

3. Bentuk organisasi fungsional (*functional organization*), dimana Organisasi fungsional disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi sesuai dengan kepentingan organisasi. Tiap-tiap fungsi saling berhubungan karena antara satu fungsi dengan lainnya saling bergantung. Dengan demikian, wewenang dalam organisasi fungsional dilimpahkan oleh pucuk pimpinan kepada unit-unit (satuan organisasi) dibawahnya atas dasar fungsi, dan pimpinan dari tiap unit berhak untuk memerintah kepada semua pelaksana yang ada dibawahnya sepanjang menyangkut tugas masing-masing.
4. Bentuk organisasi staf dan garis (*line and staff organization*), dimana bentuk ini merupakan perpaduan antara dua bentuk organisasi, yaitu organisasi lini dan organisasi staf. Wewenang diserahkan dari pucuk pimpinan kepada unit-unit organisasi yang ada dibawahnya dalam semua bidang pekerjaan dan di bawah pucuk pimpinan ditempatkan staf. Staf ini tidak mempunyai wewenang lini atau garis (wewenang komando) ke bawah. Staf berfungsi hanya sebagai pemberi nasihat, pemberi pertimbangan sesuai bidang keahliannya.
5. Bentuk organisasi garis dan fungsional (*line and functional organization*), dimana merupakan perpaduan antara organisasi fungsional dan organisasi lini/garis. Wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada unit-unit

organisasi yang ada dibawahnya dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu sesuai kebutuhan organisasi. Masing-masing pimpinan dari setiap unit.

6. Bentuk organisasi garis, fungsional, dan staf. Bentuk organisasi garis, fungsional, dan staf adalah suatu organisasi yang merupakan perpaduan dari tiga bentuk organisasi, yaitu organisasi fungsional, organisasi lini, dan organisasi staf.
7. Bentuk organisasi lini, fungsional, dan staf adalah organisasi dimana wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada unit-unit organisasi yang ada dibawahnya dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu sesuai kebutuhan organisasi.
8. Bentuk organisasi panitia (*committee organization*), dimana bentuk organisasi panitia yaitu apabila kegiatan itu dilakukan kelompok.

Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai satu tujuan bersama yang didalamnya beranggotakan minimal dua orang, yang memiliki struktur organisasi, pembagian tugas, sistem kejasama atau sistem sosial yang berdasarkan pada wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi yang memiliki mekanisme yang mempersatukan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tujuan bersama tersebut.

Memahami perilaku organisasi secara utuh terkait dengan memetakan sumber daya manusia (SDM) agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Senada dengan itu, Triatna Cepi (2016 : 47) menekankan dalam mengelola SDM harus memperhatikan, diantaranya:

1. Manajemen kerja (*managing work*) yang lebih menekankan pada fungsi manajemen kerja atau tugas individu dalam organisasi, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.
2. Manajemen manusia (*managing people*) ini lebih pada aspek pelaksanaan dari komunikasi, kepemimpinan dan motivasi individu atau kelompok.

Berpijak pada hal diatas, baha perilaku organisasi ada keterkaitannya dengan sikap prilaku individu atau kelompok terhadap organisasi.

Berangkat dari berbagai kebutuhan tentang keingintahuan dari para praktisi dalam organisasi tentang cara-cara mempelajari perilaku yang mempengaruhi laju dari organisasi, ilmu perilaku organisasi telah menjelma sebagai satu cabang ilmu sosial yang memberikan satu tahapan penting dalam menempatkan seorang menjadi individu yang pantas sebagai seorang pimpinan atau penentu dalam tatalaksana organisasi. Hal ini dapat dimengerti mengingat untuk menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi bukan hal yang mudah. Berbagai karakter yang dihadapi dan berbagai dialektika kepentingan antara individu dan kelompok yang selalu menyumbangkan masalah dalam organisasi tersebut. Apabila diurutkan individu dengan perilaku dari berbagai hal yang memengaruhinya akan selalu dipelajari dalam tahapan awal sebelum tatalaksana dan strategi dalam pengelolaan dan pengembangan organisasi.

Dengan demikian perilaku organisasi merupakan suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu kelompok tertentu. Hal ini meliputi aspek yang ditimbulkan oleh pengaruh organisasi terhadap manusia, demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap

organisasi. Tujuan praktis dari penelaahan studi ini adalah untuk mendeterminasi bagaimanakah perilaku manusia itu memengaruhi usaha pencapaian tujuan organisasi.

Dalam perilaku organisasi juga merupakan suatu cara berpikir, suatu cara untuk memahami persoalan-persoalan dan menjelaskan secara nyata hasilhasil penemuan berikut tindakan-tindakan pemecahan masalah. Perilaku organisasi dapat pula dirumuskan sebagai suatu sistem studi dari sifat organisasi seperti misalnya bagaimana organisasi dimulai, tumbuh dan berkembang serta bagaimana pengaruhnya terhadap anggota-anggota sebagai individu, kelompok pemilih, organisasi lainnya, dan institusi-institusi lainnya yang lebih besar. Mempelajari perilaku organisasi sifatnya agak abstrak. Mempelajari perilaku organisasi sering kali menghasilkan atau menemui prinsip-prinsip yang kompleks dimana penjelasan atau analisisnya bersifat situasional. Pengertian perilaku organisasi untuk multi disiplin dapat digambarkan dalam beberapa hal, yaitu:

1. Perilaku organisasi adalah cara berfikir, perilaku adalah aktivitas yang ada pada diri individu, kelompok, dan tingkat organisasi;
2. Perilaku organisasi adalah multi disiplin yang mencakup teori, metode dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin ilmu;
3. Perilaku organisasi terdapat suatu orientasi kemanusiaan, dimana terdapat perilaku, persepsi, perasaan, dan kapasitas pembelajar;
4. Perilaku organisasi berorientasi pada kinerja, tujuan organisasi adalah meningkatkan produktivitas, bagaimana perilaku organisasi ini dapat mencapai tujuan tersebut;

5. Lingkungan eksternal sangat memberikan pengaruh terhadap perilaku organisasi; dan
6. Untuk mempelajari perilaku organisasi ini perlu menggunakan metode ilmiah, karena bidang perilaku organisasi ini sangat tergantung dari disiplin ilmu yang meliputinya.

2.1.3 Teori/Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (goals), program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar (Abdul Wahab, 1997: 2). Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum maupun khusus. Sejalan dengan makna kebijakan yang dikemukakan oleh United Nation tersebut di atas, Fredrick (dalam Islamy, 1998) memberikan pengertian kebijakan, yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah

serta perilaku Negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan Negara atau kebijakan publik (*publik policy*).

Sedangkan pengertian kebijakan publik atau Negara itu sendiri juga didefinisikan berbeda oleh para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Dye (dalam Islamy, 1998) bahwa kebijakan Negara sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Lebih lanjut Dye, mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah.

Edward dan Sharkansky (dalam Islamy, 1998 : 94). Mengatakan bahwa kebijakan Negara yaitu “*is what government say and do, or not do, it is the goals or purposes of government programs*” (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah). Berdasarkan pengertian di atas bagaimanapun rumusannya pada hakikatnya kebijakan Negara mengarah kepada kepentingan publik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Oleh karena itu, maka kebijakan Negara dapat disimpulkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tentang kebijakan dan kebijakan publik yang telah diuraikan di atas, Islamy mengemukakan beberapa elemen penting tentang kebijakan Negara (*public policy*), yaitu:

- a. Bahwa kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perlu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan Negara harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat. (Islamy, 2002: 20).

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

Menurut Hamdi (2014:97), “pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”.

Kemudian menurut Wibawa (Tahir, 2014:58), tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Nugroho (2014:657) menyatakan, “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.

Kemudian menurut Mulyadi (2015:26), “implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berba-gai lapisan masyarakat”.

Pandangan Edwards III dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015 : 85) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan

sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasar, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementasi kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementasi dan sumberdaya finansial sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.
4. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implentasi kebijakan.

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating* atau SOP) SOP menjadi pedoman bagi setiap implementasi dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.1.4 Teori/Konsep Masyarakat Kota dan Penataan Kota

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur (Radiansyah, 2008 :214).

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasikan ada: Masyarakat pemburu, masyarakat bercocok tanam, dan masyarakat *agricultural intensif* yang juga disebut

masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat tradisional (Soerjono Soekanto, 1985 : 29).

Berikut di bawah ini adalah beberapa pengertian masyarakat dari beberapa ahli sosiologi dunia :

1. Menurut Selo Sumardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
2. Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.
3. Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.
4. Menurut Paul B.Horton & C.Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relative mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut (Radiansyah, 2008 : 216).

Dari lahir sampai mati manusia hidup sebagai anggota masyarakat. Hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang disekitar dan dengan demikian mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Masyarakat sangat luas dan dapat meliputi seluruh umat manusia. Masyarakat terdiri atas berbagai kelompok, yang besar maupun kecil bergantung pada jumlah anggotanya. Dua orang atau lebih dapat merupakan kelompok. Tiap orang menjadi

anggota keluarga yang terdiri atas ibu-ayah dan anak, atau keluarga besar yang juga mencakup paman, kakek, cucu dan sebagainya (Nurani Soyomukti, 2010 : 408).

Dalam pengelompokan sering dibedakan kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok pertama dimana ia mula-mula berinteraksi dengan orang lain yakni keluarga, kelompok sepermainan, dan lingkungan tetangga. Dalam kelompok primer terdapat hubungan temu-muka langsung dalam suasana akrab. Dalam kelompok ini ia mempelajari kebiasaan yang fundamental seperti bahasa, soal baik buruk, kemampuan untuk mengurus diri sendiri, kerja sama dan bersaing. Disiplin dan sebagainya. Kelompok primer juga sering disebut *Gemeinschaft*. (S.Nasution, 2004 :60-61).

Masyarakat menurut kamus bahasa Indonesia adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan yang berbudaya. Sedangkan masyarakat kota adalah masyarakat yang tinggal didaerah dekat dengan pusat pemerintahan. Masyarakat kota terdiri dari beragam suku dan kebanyakan biasanya pendatang.

Weber (1993:18), misalnya menyatakan bahwa suatu tempat dikatakan kota apabila penghuni setempat dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya dipasar lokal, sehingga ciri kota menurut Weber adalah adanya pasar serta adanya sistem hukum dan lain-lain yang tersendiri dan bersifat kosmopolitan. Ada ciri yang menonjol pada masyarakat perkotaan, yaitu :

1. Kehidupan keagamaannya berkurang, kadangkala tidak terlalu dipikirkan karena memang kehidupan yang cenderung kearah keduniaan saja.

2. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus berdantung pada orang lain (Individualisme).
3. Pembagian kerja diantara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata.
4. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota.
5. Jalan kehidupan yang cepat dikota-kota, mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi warga kota, sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting, intuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu.
6. Perubahan-perubahan tampak nyata dikota-kota, sebab kota-kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar.

Penataan kota atau tata ruang kota adalah strategi perencanaan untuk mengatur penggunaan ruang di dalam kota. Penataan kota dilakukan untuk menciptakan kota yang teratur, tertib, dan tidak menimbulkan masalah sosial di masyarakat.

Penataan kota mencakup kebutuhan perekonomian, sosial, dan kebudayaan. Penataan kota juga memperhatikan kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana. Perencanaan kota berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, baik dalam bidang social, ekonomi, hingga lingkungan hidup.

Orang yang fokus pada perencanaan tata kota disebut sebagai ahli tata kota atau urban planner.

Penataan perkotaan atau tata ruang kota adalah strategi perencanaan yang bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang di dalam kota. Penataan perkotaan dilakukan untuk menciptakan kota yang tertib, teratur, dan tidak menimbulkan masalah sosial di masyarakat.

Penataan perkotaan memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

1. Mewujudkan wilayah perkotaan yang strategis, nyaman, dan indah
2. Membuat suatu tempat menjadi bernilai dan mempunyai ciri khas
3. Memanfaatkan ruang dengan efisien untuk memenuhi kebutuhan perekonomian, sosial, dan kebudayaan.

Perencanaan perkotaan adalah perencanaan tata ruang kota yang mencakup segala aspek kehidupan dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan kota yaitu pembuatan gambaran pola lingkungan fisik yang ada dan hubungan ruang kota dengan fungsi yang saling berkaitan. Penyeenggaraan perencanaan kota dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Perencanaan perkotaan dilakukan sebagai suatu produk pembangunan sehingga proses tata ruang kota dilakukan secara terpadu. Perencanaan tata ruang terpadu meliputi perencanaan fisik, perencanaan spasial, kemitraan, dan kelengkapan sumber daya. Selain itu, perencanaan perkotaan dilandasi pada pemenuhan kepentingan masyarakat. Pertimbangan utama dalam perencanaan perkotaan adalah ketersediaan sumber daya dan tingkat keberhasilan dari perencanaan.

2.1.5 Teori/Konsep Lingkungan Hidup

Secara realistis lingkungan merupakan suatu cabang yang baru dalam cabang ilmu pengetahuan, namun demikian dalam perkembangannya merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini disebabkan karena pendekatan yang dipakai oleh ilmu lingkungan adalah pendekatan yang bersifat menyeluruh. Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai:

1. daerah tempat suatu makhluk hidup berada;
2. keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup;
3. keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup.

Menurut Undang Undang RI No. 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan yang sangat menentukan.

Namun demikian, baik lingkungan fisik, biologis, maupun lingkungan sosial selalu mengalami perubahan-perubahan, agar lingkungan tersebut dapat mempertahankan kehidupannya secara serasi, maka manusia perlu melakukan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap perubahan-perubahan itu di tentukan oleh bermacam-macam faktor yaitu:

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut
2. Hubungan interaksi antara unsure dalam lingkungan hidup itu
3. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup
4. Faktor nonmaterial yaitu, keadaan suhu, cahaya, energi, dan kebisingan.

2.1.6 Teori/Konsep Otonomi Daerah

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*.

Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi.

Koesoemahatmadja sebagaimana dikutip I Nyoman S berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*), juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*). Namun

demikian, walaupun otonomi ini sebagai *self government*, *self sufficiency* dan *actual independence*, keotonomian tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah. Otonomi, menurut Manan sebagaimana yang dikutip Sondang P.S mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri. Kemandirian, menurut Syafrudin, sebagaimana yang dikutip I Nyoman S bukan berarti kesendirian, bukan pula sendiri-sendiri karena tetap bhinneka tunggal ika, melainkan untuk memecahkan masalah-masalah daerahnya sendiri tidak selalu dan terlalu menggantungkan diri kepada pemerintah pusat.

Otonomi daerah merupakan salah satu agenda utama reformasi yang bertujuan memangkas kesenjangan ekonomi-politik antara pemerintah pusat dan daerah. Karena kebijakan sentralistis yang dipraktikkan pada masa pemerintahan Suharto telah memunculkan ketimpangan kewenangan antara pusat dan daerah yang berujung pada munculnya ancaman disintegrasi. Disamping itu, tuntutan reformasi diantaranya adalah mengagendakan adanya reformasi hukum yang fundamental yang menghasilkan hukum yang responsif, yang tanggap terhadap kenutuhan masyarakat dan mengakomodir semua keragaman yang ada dalam masyarakat (Iza Rumesten Rs, 2014: 351).

Otonomi daerah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, berdasarkan prinsip otonomi tersebut, maka ada keharusan dari pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian hak dan kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak lain termasuk pemerintah pusat. Dengan kata lain, otonomi

daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah atas inisiatif atau prakarsa sendiri tanpa instruksi pemerintah pusat.

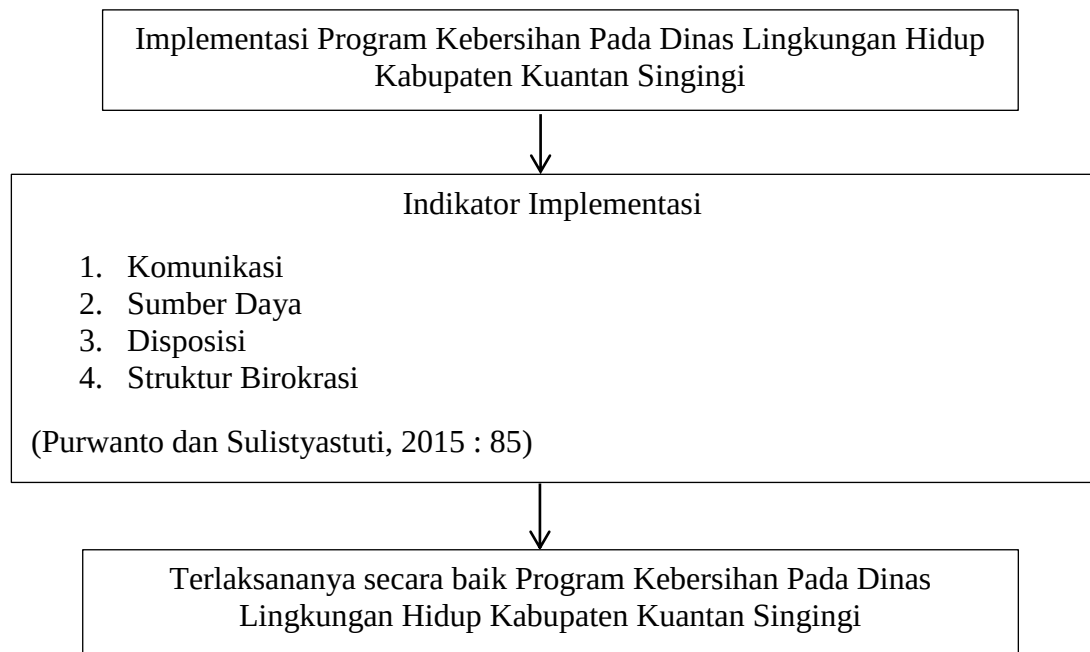
Selain itu, seperti yang dikatakan Lord Acton tentang kekuasaan, otonomi daerah sejatinya lahir sebagai upaya untuk membongkar sentralisme kekuasaan (*centralism of power*) terutama dalam hal tata relasi pusat dan daerah. Artinya, desentralisasi dan demokratisasi menghendaki adanya pemencaran kekuasaan. Semangat membatasi kekuasaan negara ini setelah lahirnya adagium yang sangat populer dari Lord Acton; “*Power tends to corrupt, but absolut power corrupt absolutely*”; Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (*absolute*) pasti akan disalah gunakan” (Mariam Budiardjo dalam Ridwan HR, 2013:4-5).

Otonomi daerah dalam konteks Indonesia merupakan salah satu agenda utama reformasi yang bertujuan memangkas kesenjangan ekonomi-politik antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana kita ketahui, kebijakan sentralistik yang dipraktikkan di masa pemerintahan Suharto telah memunculkan ketimpangan kewenangan antara pusat dan daerah yang berujung pada munculnya ancaman disintegrasi. Reformasi 1998 menjadi titik tolak bergesernya paradigma pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik atau desentralisasi. Desentralisasi dalam konteks Indonesia diyakini sebagai sebuah cara untuk membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis, menghargai keragaman lokal, menghormati dan mengembangkan potensi masyarakat lokal, serta memelihara integrasi nasional.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Kerja

Hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah diduga implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus Kecamatan Kuantan Tengah) kurang terimplementasi.

2.4 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisis penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini.

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, dengan indikator :

1. Kominikasi, diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III perlu disampaikan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Sumber Daya, Edward III mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.
3. Disposisi, Pengertian disposisi menurut Edwrd III dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implentors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
4. Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya perosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam

bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menumbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak ileksibel.

2.5 Operasional Variabel

Operasional Variabel adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada peneliti tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Defenisi variabel merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti mengetahui penjelasan variabel yang dipilih oleh peneliti.

Tabel 2.1 : Operasional Variabel Penelitian Implementasi Program Kebersihan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Variabel	Indikator	Item Penelitian
Teori Implementasi Menurut Edwar III (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2015 : 85)	1. Komunikasi	Terimplementasi
		Cukup Terimplementasi
		Kurang Terimplementasi
		Tidak Terimplementasi
	2. Sumber Daya	Terimplementasi
		Cukup Terimplementasi
		Kurang Terimplementasi
		Tidak Terimplementasi
	3. Disposisi	Terimplementasi
		Cukup Terimplementasi
		Kurang Terimplementasi
		Tidak Terimplementasi
	4. Struktur Birokrasi	Terimplementasi

Variabel	Indikator	Item Penelitian
		Cukup Terimplementasi
		Kurang Terimplementasi
		Tidak Terimplementasi

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah survei, dengan tingkat eksplanasi deskriptis dan analisis data kualitatif.

Survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel. (Sugiyono, 2016 : 7)

Kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. (Sugiyono, 2016 : 15)

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (*perspektif subjek*) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian *Explanatory Research*. Menurut Sugiyono (2019 :18), *explanatory research* merupakan metode penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh variabel satu dengan variabel lainnya. Alasan utama peneliti menggunakan metode penelitian *explanatory research* yaitu untuk

menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan dari penelitian ini dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen yang ada. Penelitian ini akan menguji pengaruh hubungan antar variabel. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel yang akan diteliti, yaitu variabel independen terdiri dari kualitas produk sebagai variabel independen (X1) dan kualitas pelayanan (X2), serta loyalitas pelanggan (Y) sebagai variabel dependen.

3.2 Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun informan penelitian tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian tentang Implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi

No	Unsur Informasi	Jumlah Informasi	Persentase (%)
1	Kepala Dinas	1	11%
2	Kepada Bidang Tata Lingkungan	1	11%
3	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	1	11%
4	Kasi Pengawasan Lingkungan Hidup	1	11%
5	Kasi Pengendalian Dampak Lingkungan	1	11%
6	Kasi Pengawasan Lingkungan Hidup	1	11%
7	Petugas Kebersihan	3	33%
Jumlah		9	100%

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2025

3.3 Sumber Data Penelitian

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari pengumpulan data. Data yang diperoleh merupakan hasil dari angket yang telah dibagikan kepada responden, yang kemudian responden akan menjawab pernyataan yang sudah tersusun secara sistematis dalam lembar kuesioner.

Data primer yang terdapat pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan sumber data yang telah diperoleh dari responden, yaitu orang yang merespon dan menjawab pernyataan-pernyataan yang telah disebarkan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2019), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup yang sudah tersedia jawabannya sehingga responden langsung memilih, dengan angket langsung dengan menggunakan skala bertingkat. Skala bertingkat dalam angket ini menggunakan modifikasi skala likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju. Skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan (positif) atau tidak mendukung (negatif).

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku referensi, jurnal penelitian, internet dan lain-lain.

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan data yang bersifat mendukung data primer seperti buku-buku, bacaan dan literatur (Sugiyono 2019:137). Dalam penelitian ini data

sekunder berasal dari jurnal, artikel, skripsi, tesis, buku-buku yang relevan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, data dari internet, skripsi maupun tesis penelitian yang sebelumnya.

3.4 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan dengan ditetapkan lokasi dalam penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh). Observasi adalah mengemukakan observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai

aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan pengindraan. Dan merupakan dari suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan.

3.6.2 Wawancara

Pengumpulan Data dengan Wawancara (*Interview*) Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019 : 194), wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara menurut Sugiyono (2016:194) menyatakan bahwa “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam”.

3.6.3 Dokumentasi

Sugiyono (2018:240) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk dalam tulisan (catatan harian, peraturan kebijakan), gambar (foto, gambar, sketsa), atau karya monumental dari seseorang.

3.7 Metode Analisi Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian baik data primer maupun data skunder, akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan mekanisme penulisan skripsi.

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian dan hubungannya terhadap keseluruhannya (*Spradley*). Analisis data adalah proses sistematis mencari dan mengatur transkrip dengan wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang Anda dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman Anda sendiri tentang mereka dan untuk memungkinkan Anda mempresentasikan apa yang telah Anda temukan kepada orang lain. Analisis data kualitatif mencakup pengelompokan hal-hal orang dan peristiwa dan sifat-sifat yang menjadi ciri mereka.

3.7.1 Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melakukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalamannya data pada proses pengumpulan data berikutnya.

3.7.2 Reduksi Data

Yaitu sebagai suatu proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, informasi data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak penelitian memfokuskan wilayah penelitian.

3.7.3 Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai

dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca.

3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2. Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Program Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2024-2025																							
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	x																							
2	Pembuatan Proposal			x																					
3	Bimbingan Proposal							x	x	x	x	x	x	x											
4	Seminar Proposal																								
5	Revisi Proposal																								
6	Pembuatan Skripsi																								
7	Bimbingan Skripsi																								
8	Sidang Skripsi																								
9	Revisi Skripsi																								

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2025

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Kuantan Singingi

Sejarah berdirinya DLH Kuantan Singingi tidak terlepas dari pembentukan Provinsi Riau pada tahun 1958, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1957 tentang penyerahan sebagian urusan pusat kepada Daerah Swatantra I Riau. Kabupaten Kuantan Singingi sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi antara lain:

- a. Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
- b. Pembentukan organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

- c. Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012.
- d. Sejarah pembentukan DLH juga terkait dengan pembentukan Provinsi Riau pada tahun 1958 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1957 dan Surat Keputusan Gubernur Riau No. 250/22D/58 tanggal 1 September 1958.

Secara ringkas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang bertugas mengelola urusan lingkungan hidup di wilayah kabupaten, dengan dasar hukum utama berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur pembentukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi DLH tersebut.

4.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Kuantan Singingi

4.2.1 Visi

Kuansing yang sejahtera, Beradat, Maju dan Berkelanjutan (KUANSING HEBAT) Tahun 2045

4.2.2 Misi

- a. Mewujudkan tranformasi sosial menuju masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera
- b. Mewujudkan tranformasi ekonomi daerah yang inklusif berbasis potensi wilayah melalui pengembangan hilirisasi produk

- c. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang memegang teguh nilai adat-istiadat dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia untuk memantapkan ketahanan sosial
- d. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan
- e. Mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayah yang berkualitas dan merata
- f. Mewujudkan tranformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas serta memperkuat kerjasama antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

4.3 Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi

4.3.1 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel 4.1 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
SEKRETARIAT			
1	2	3	4
1	<u>DEFLIDES GUSNI, SP,M.Si</u> NIP. 19691231 200003 1 026	Pembina Utama Muda, IV/c	KEPALA DINAS
2	<u>MAULINA REZA, SE, M.Si</u> NIP. 19690808 199112 2 001	Pembina IV/b	SEKRETARIS
3	<u>MARDALENA, S.Hum</u> NIP. 19760612 200701 2 009	Penata III/d	Kasubbag Keuangan
4	<u>ANGRIANI ETIKA SANTI, SE</u> NIP. 19770509 200701 2 003	Peenata Tk.I III/d	Perencana
5	<u>WIWIK CANDRAYENI, SE</u> NIP. 19801211 200012 2 001	Peenata Tk.I III/d	Kasubbag Umum

6	<u>IRDA YUSNERI, S.Sos</u> NIP. 19800831 200701 2 003	Peenata Tk.I III/d	Penelaah Teknis Kebijakan
7	<u>LENI YENDASARI</u> NIP. 19740824 200701 2 007	Peenata Muda III/a	Pengadministrasi Keuangan
8	<u>TRANDIANTO</u> NIP. 19800404 200801 1 019	Pengatur II/d	Analisis Administrator Database
BIDANG TATA LINGKUNGAN HIDUP			
1	2	3	4
9	<u>GUNAWAN NURDIANTO, S.Si</u> NIP. 19850926 201001 1 010	Penata Tk 1 III/d	KEPALA BIDANG
10	<u>HJ. NURNANINGSIH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19720310 199203 2 004	Pembina IV/a	Pengendalian Dampak Lingkungan
11	<u>EDI SURYA, SKM.M.Kes</u> NIP. 19730910 199303 1 003	Pembina IV/a	Pengawas Lingkungan Hidup
12	<u>ZULNAFRI</u> NIP. 19811129 200501 11 003	Penata Tk I II/d	Pranata Pengambilan Sampel
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, PERTAMANAN & LIMBAH B3			
1	2	3	4
13	<u>HARDIMAN, S.ST., MT</u> NIP. 19720723 199703 1 002	Pembina IV/a	KEPALA BIDANG
14	<u>HARDI FRIDESSONI, S.Hut</u> NIP. 19810225 200012 1 001	Penata Tk. I III/d	Pengendali Dampak Lingkungan
15	<u>SYAFRIANTO, A.Md</u> NIP. 19670620 199803 1 002	Penata III/c	Pengawas Lingkungan Hidup
16	<u>DEKI ZULKARNAIN</u> NIP. 19740525 201001 1 002	Pengatur Tk. I II/d	Pranata Pengambilan Sampel
17	<u>SYAIYINA SAPRI</u> NIP. 19710927 200801 1 004	Juru I/c	Pengemudi
18	<u>SUHENDRI</u> NIP. 19770707 200904 1 002	Juru I/c	Pengemudi
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
1	2	3	4
19	<u>MUHAMMAD PASRI, S. Hut</u> NIP. 19720729 199301 1 002	Pembina IV/a	KEPALA BIDANG

20	<u>WARASTUTI, ST</u> NIP. 19780120 200501 2 007	Penata Tk.I III/d	Pengawas Lingkungan Hidup
21	<u>FACHRIMAYANDI, ST</u> NIP. 19810731 201001 1 009	Penata Tk.I III/d	Pengendali Dampak Lingkungan
22	<u>MUHAMMAD ISMET, ST., MT</u> NIP. 19900104 201903 1 001	Penata III/c	Analisis Lingkungan Hidup
23	<u>RAHMADIAN EKA</u> NIP. 19780512 201001 1 007	Pengatur Tk.I II/d	Pranata Pengambilan Sampel
BIDANG PENATAAN & PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP			
1	2	3	4
24	<u>ERMI JOHAN, S.Si</u> NIP. 19721128 200701 1 007	Pembina IV/a	KEPALA BIDANG
25	<u>RISNINA HERDAWATI, SE., M.Si</u> NIP. 19790224 200604 2 011	Pembina IV/a	Pengawas Lingkungan Hidup
26	<u>FIRMAN EDDY, L. SKM</u> NIP. 19770429 199804 1 003	Penata Tk.I III/d	Pengawas Lingkungan Hidup
27	<u>R. IFRIADI, S.Si., M.Si</u> NIP. 19811020 201001 1 020	Penata Tk.I III/d	Pengawas Lingkungan Hidup
28	<u>SYAWAL DIYUS, S.Si</u> NIP. 19830724 201001 1 007	Penata Tk.I III/d	Penyuluh Lingkungan Hidup
29	<u>ARMEN PITO</u> NIP. 19760527 200604 1 009	Penata Muda III/a	Pranata Pengambilan Sampel

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2025

4.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi

1) Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan, kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan urusan

pemerintahan bidang lingkungan hidup, maka Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup
- b. Perencanaan dibidang lingkungan hidup
- c. Pengorganisasian dibidang lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan fasilitas dibidang lingkungan hidup
- e. Pelaksanaan kegiatan dibidang lingkungan hidup
- f. Pembinaan dibidang lingkungan hidup
- g. Pengawasan dibidang lingkungan hidup
- h. Pengendalian dan monitoring dibidang lingkungan hidup
- i. Pengevaluasian dan pelaporan dibidang lingkungan hidup
- j. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Sekretariat

Sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, keprotokolan, program dan keuangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan data
- b. Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan

- c. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup
- d. Penyelenggaraan ketatausahaan
- e. Pembinaan kepegawaian
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana
- g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga
- h. Penyelenggaraan perjalanan dinas
- i. Penyelenggaraan fungsi kehumasan
- j. Penyelenggaraan keprotokolan
- k. Pengelolaan keuangan
- l. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang dan fungsinya

3) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris. Kepala sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan keprotokolan. Kepala sub bagian umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan kegiatan ketatausahaan
- b. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian

- c. Penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan urusan rumah tangga
- e. Penyiapan bahan penyelenggaraan perjalanan dinas
- f. Penyiapan bahan penyelenggaraan kehumasan
- g. Penyiapan bahan penyelenggaraan keprotokolan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang dan fungsinya

4) Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian program yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris. Kepala sub bagian program mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman dan acuan kerja
- b. Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana dan program Dinas
- c. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup
- d. Merumuskan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalam rangka penyusunan anggaran Dinas Lingkungan Hidup

- e. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama di bidang pengelolaan lingkungan hidup
- f. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pengelolaan lingkungan hidup
- g. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman dan acuan kerja
- h. Mempersiapkan bahan penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk perencanaan daerah lima tahunan
- i. Mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- j. Menyiapkan bahan penyusunan Renstra untuk perencanaan SKPD lima tahunan
- k. Melaksanakan kegiatan penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
- l. Mengoordinasikan dan mengumpulkan data penyusunan rencana program dan anggaran
- m. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan
- n. Menyusun, melaksanakan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

5) Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris. Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran keuangan
- b. Menyiapkan bahan penggunaan pengeluaran anggaran keuangan
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian dibidang keuangan
- e. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi anggaran keuangan
- f. Menyiapkan bahan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bagian keuangan
- g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja sub bagian keuangan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang dan fungsinya

6) Penelaah Teknis Kebijakan

Penelaah Teknis Kebijakan di Dinas Lingkungan Hidup melakukan analisis dan penelaahan untuk menyusun rekomendasi kebijakan di bidang lingkungan hidup. Tugas-tugas seorang Penelaah Teknis Kebijakan meliputi:

- a. Menganalisis dan menelaah dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang lingkungan hidup

- b. Melaksanakan penyusunan kebijakan pemantauan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- c. Melaksanakan pemantauan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH
- d. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH
- e. Melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan meliputi komisi penilai, tim pakar dan konsultan
- f. Melaksanakan pemeriksaan dokumen lingkungan meliputi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan), UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), dan dokumen lingkungan lainnya
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan
- h. Menyusun rencana dan program bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Lingkungan Hidup
- i. Menyusun Kebijakan Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- j. Menyusun kebijakan perizinan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
- k. Menyusun kebijakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH
- l. Menyusun kebijakan Penyelesaian pengaduan masyarakat

- m. Menyusun kebijakan Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

7) Pengadministrasi Keuangan

Jabatan Pengadministrasi Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup adalah jabatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan. Tugas-tugas seorang Pengadministrasi Keuangan meliputi:

- a. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
- b. Menyiapkan bahan penyusunan penatausahaan keuangan dinas
- c. Membuat pelaporan penatausahaan keuangan dinas
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- e. Memberikan dukungan pelayanan administrasi keuangan

8) Analisis Administrator Database

Administrator di Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis. Sekretariat melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran. Selain itu, sekretariat bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan. Tugas lainnya meliputi urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana, dan hubungan masyarakat. Sekretariat juga memiliki peran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi, serta pengelolaan dan pengamanan aset. Kepala Dinas Lingkungan Hidup bertugas

memimpin dan mengkoordinasikan program kerja dinas. Ini mencakup perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, serta pengendalian dan pembinaan teknis. Kepala Dinas juga bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.

Tugas pokok Kepala Seksi meliputi melakukan kebijakan teknis analisis dampak lingkungan hidup. Kepala Seksi bertugas menyusun bahan rumusan kebijakan teknis di bidang analisis dampak lingkungan hidup, serta melakukan penelitian terhadap dokumen lingkungan dan pelaksanaan proses izin lingkungan. Kepala Bidang bertugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kebijakan teknis pengendalian, pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

9) Bidang Tata Lingkungan

Bidang tata lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang tata lingkungan. Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dibantu oleh Kepala Seksi. Seksi sebagaimana terdiri dari, Seksi Inventarisasi Data dan Sistem Informasi Lingkungan Hidup, Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup, Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

10) Pengendalian Dampak Lingkungan

Pengendali Dampak Lingkungan adalah jabatan fungsional yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan. Pengendali Dampak Lingkungan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Instansi Pemerintah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas. Tugas dan fungsi meliputi :

- a. Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis pengendalian lingkungan hidup.
- b. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi.
- c. Melaksanakan kebijakan teknis pengendalian, pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- d. Perumusan kebijakan teknis pengendalian, pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam bidang pengendalian, pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang.
- g. Penyelenggaraan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- h. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

11) Pengawasan Lingkungan Hidup

Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawas Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup pada Instansi Pemerintah. Tugas jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup meliputi :

- a. Persiapan pengawasan lingkungan hidup.
- b. Pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.
- c. Kegiatan pasca pengawasan.
- d. Pengawasan tidak langsung, yaitu evaluasi laporan rutin penataan usaha dan/atau kegiatan.
- e. Penegakan hukum, yaitu penegakan hukum pidana.
- f. Pengkajian pengawasan lingkungan hidup.
- g. Analisa pengawasan lingkungan hidup.

12) Pranata Pengambilan Sampel

Jabatan Pranata Pengambilan Sampel dalam bidang tata lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan. Jabatan ini bertanggung jawab untuk melakukan pengambilan sampel dari berbagai sumber, seperti air, tanah, udara, dan limbah, untuk dianalisis dan dievaluasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa

kondisi lingkungan memenuhi standar yang ditetapkan dan untuk mendeteksi adanya pencemaran atau dampak negatif lainnya. Tugasnya meliputi :

- a. Pengambilan Sampel: Melakukan pengambilan sampel dari lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini termasuk pemilihan waktu dan metode pengambilan yang tepat.
- b. Pengolahan dan Penyimpanan Sampel: Memastikan bahwa sampel yang diambil diproses dan disimpan dengan cara yang benar untuk menjaga keakuratan hasil analisis.
- c. Analisis Data: Bekerja sama dengan laboratorium untuk menganalisis sampel yang telah diambil dan menginterpretasikan hasilnya.
- d. Pelaporan: Menyusun laporan hasil pengambilan dan analisis sampel yang mencakup data, temuan, dan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya.
- e. Pemantauan Lingkungan: Melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perubahan kualitas lingkungan dan dampaknya.
- f. Sosialisasi dan Edukasi: Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan.
- g. Koordinasi: Berkolaborasi dengan instansi lain, seperti Badan Lingkungan Hidup dan lembaga penelitian, untuk meningkatkan efektivitas pemantauan lingkungan.

13) Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3)

Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah B3 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah B3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah B3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dibantu oleh Kepala Seksi. Seksi sebagaimana terdiri dari:

- a. Pengendalian Dampak Lingkungan
- b. Pengawas Lingkungan Hidup
- c. Pranata Pengambilan Sampel
- d. Pengemudi I
- e. Pengemudi II

14) Pengemudi

Pengemudi di Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas utama melakukan kegiatan pemeriksaan dan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas. Uraian tugas seorang pengemudi di Dinas Lingkungan Hidup meliputi:

- a. Memeriksa kelengkapan kendaraan dinas, seperti mengecek rem, oli, lampu, air radiator, air aki, dan tekanan udara ban

- b. Memberikan layanan transportasi yang bersifat kedinasan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku
- c. Mengemudikan dan merawat kendaraan dinas
- d. Memantau kondisi kendaraan dan melaporkan kepada penanggung jawab jika ada kerusakan
- e. Menjaga kebersihan kendaraan
- f. Menolak mengantar ke tempat yang tidak semestinya dan menolak perintah yang membahayakan keselamatan pengemudi dan penumpang
- g. Mengelola semua bahan dan data peraturan perundang-undangan serta memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan transportasi

15) Analisis Lingkungan Hidup

Jabatan Analisis Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap kondisi lingkungan. Posisi ini sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program pengelolaan lingkungan. Analisis lingkungan hidup berperan dalam menilai dampak dari berbagai kegiatan terhadap lingkungan dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi serta perbaikan. Tugasnya meliputi :

- a. Mengumpulkan data terkait kualitas lingkungan, termasuk data mengenai udara, air, tanah, dan limbah.
- b. Melakukan survei lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan.
- c. Menganalisis data lingkungan menggunakan metode statistik dan alat analisis untuk memahami tren dan pola.

- d. Menginterpretasikan hasil analisis untuk menentukan dampak lingkungan dari berbagai kegiatan.
- e. Menyusun laporan analisis yang mencakup temuan, interpretasi, dan rekomendasi untuk pengelolaan lingkungan.
- f. Menyampaikan laporan kepada pimpinan dinas dan pihak terkait lainnya.
- g. Melakukan kajian mengenai dampak lingkungan dari proyek-proyek yang diusulkan, termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL).
- h. Memberikan rekomendasi untuk pengurangan dampak negatif yang mungkin terjadi.
- i. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.
- j. Mengidentifikasi perubahan kondisi lingkungan dan memberikan laporan kepada atasan.
- k. Mengedukasi masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan dan dampak dari pencemaran.
- l. Berkolaborasi dengan instansi lain, lembaga penelitian, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program analisis lingkungan.

16) Penyuluh Lingkungan Hidup

Penyuluh Lingkungan Hidup adalah melaksanakan kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan lingkungan hidup. Tugasnya meliputi :

- a. Mengumpulkan data potensi wilayah.
- b. Mengolah data potensi wilayah.

- c. Menyusun programa Penyuluh Lingkungan Hidup.
- d. Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup.
- e. Menyusun dan menyiapkan materi program dan rencana kerja penyuluhan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis daerah (UPTD)/unit pelaksana teknis (UPT) KLHK, dalam bentuk cetak.
- f. Menyusun dan menyiapkan materi program dan rencana kerja penyuluhan lingkungan hidup pada tingkat Nasional, dalam bentuk cetak.
- g. Melakukan penyebarluasan informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara komunikasi langsung, kepada Perorangan.
- h. Melakukan penyebarluasan informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara komunikasi langsung, kepada komunikasi tidak langsung, melalui pemasangan poster.
- i. Melakukan penyebarluasan informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara komunikasi langsung, kepada komunikasi tidak langsung, melalui penyebarluasan brosur, leaflet.

17) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Tata Lingkungan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dibantu oleh Kepala Seksi. Seksi sebagaimana terdiri dari :

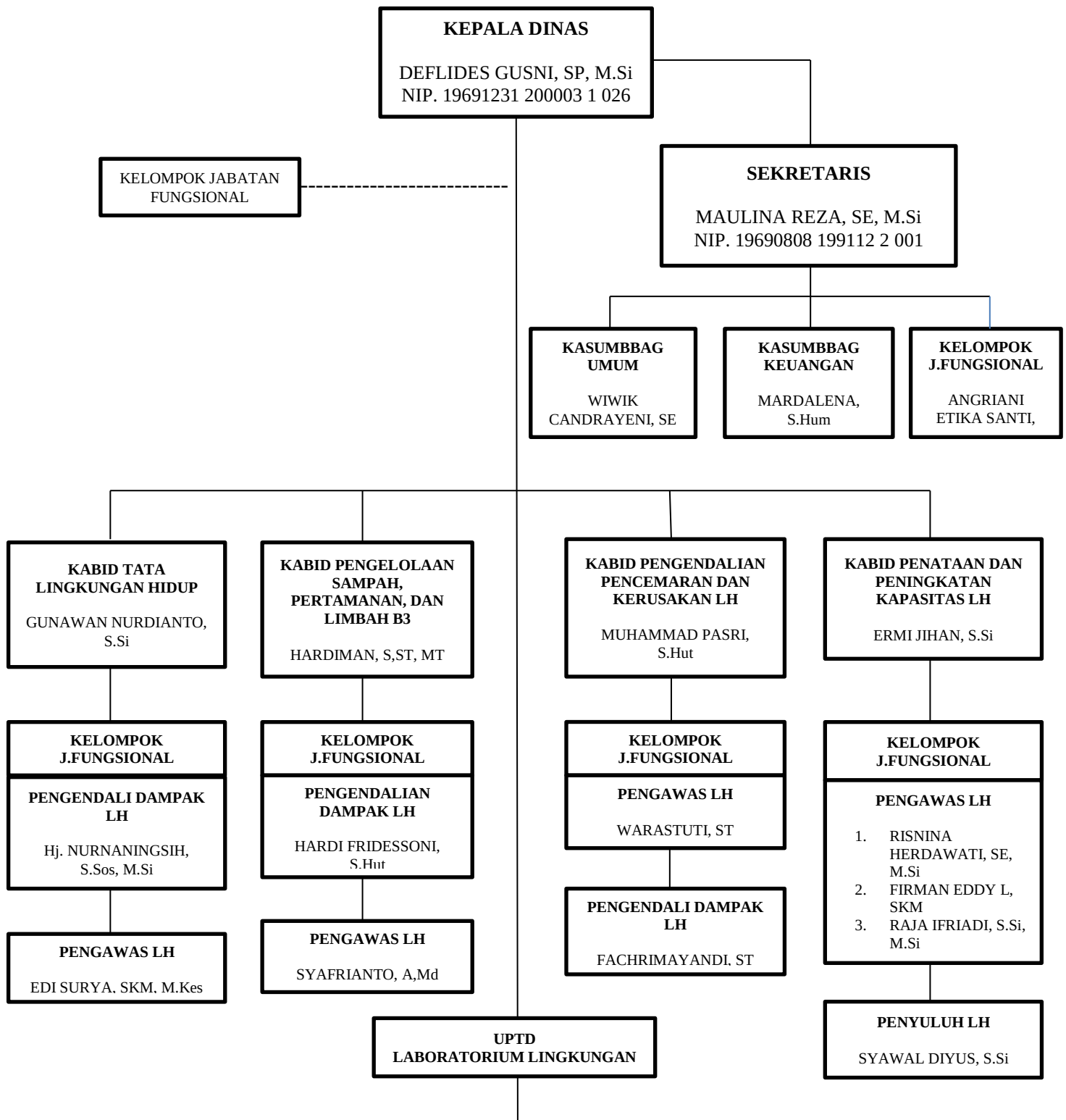
- a. Pengawas Lingkungan Hidup
- b. Pengendalian Dampak Lingkungan
- c. Analisis Lingkungan Hidup
- d. Pranata Pengambilan Sampel

18) Bidang Penataan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Penataan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Tata Lingkungan. Kepala Bidang Penataan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dibantu oleh Kepala Seksi. Seksi sebagaimana terdiri dari :

- a. Pengawasan Lingkungan Hidup I
- b. Pengawasan Lingkungan Hidup II
- c. Pengawasan Lingkungan Hidup III
- d. Penyuluh Lingkungan Hidup
- e. Pranata Pengambilan Sampel

Gambar 4.1 Strukur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi program kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi tergolong cukup terimplementasi.

6.2 Saran

6.2.1 Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup bersama pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan.

6.2.2 Penguatan Pengawasan dan Penegakan Aturan

Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penerapan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.

6.2.3 Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur Kebersihan

Penambahan dan perbaikan fasilitas seperti tempat pembuangan sampah, armada pengangkut sampah, dan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan sangat diperlukan.

6.2.4 Kolaborasi Antar Stakeholder

Dinas Lingkungan Hidup harus menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta untuk mendukung program kebersihan secara berkelanjutan.

6.2.5 Pengembangan Program Berbasis Partisipasi Masyarakat

Mengembangkan program-program yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti bank sampah, komunitas peduli lingkungan, dan program penghargaan bagi lingkungan bersih, agar tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmosudiro, Prajudi, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Cepi, Triatna. 2016. *Perilaku Organisasi Dalam Pendidikan*. Rosda.
- D, Mulyadi. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- F, Daulay. *Dasar – dasar Manajemen Organisasi*. 2016. Vol 6. No 2.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik (proses, analisis dan partisipasi)*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- J. P., Lester. & J Stewart. (2014). *Public Policy: An Evoluting Approach*. Wadsworth.
- M, Hill., & Hupe, P. (2022). *Implementasi Kebijakan Publik: Pengantar Studi Tata Kelola Operasional (edisi ke-4)*. SAGE Publications.
- M, Howlett., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studi Kebijakan Publik: Siklus Kebijakan dan Subsistem Kebijakan (edisi ke-4)*. Oxford University Press.
- M, Rachman. 2015. *5 Pendekatan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK, R&D*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Nugroho, Riyan. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Purwanto, dan Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- R.E, Matland. (2020). *Mensintesis Literatur Implementasi: Model Ambiguitas-Konflik Implementasi Kebijakan. Dalam Kebijakan Publik: Teori, Konsep, dan Model (hlm. 145–164)*. Routledge.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research Dan Development*. Bandung : Alfabeta

Syafiie, ddk. 2013. *Ilmu Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

S.C, Winter. (2020). *Perspektif Implementasi: Status dan Pertimbangan Ulang. Dalam The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration* (hlm. 463–480). Oxford University Press.

B. Jurnal

Ahmad, Ahmad, and Muslimah Muslimah. "Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif." *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*. Vol. 1. No. 1. 2021.

Armstrong, Michael. (2014). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. Kogan Page.

Data, Teknik Pengumpulan. "Observasi." *Wawancara, Angket Dan Tes* (2019).

Hamda, Normina. "Masyarakat dan Sosialisasi." *Ittihad* 12.22 (2014): 107-115.

Ismiyarto, Ismiyarto, and Honorata Ratnawati Dwi Putranti. "PERILAKU ORGANISASI (Organisasi Privat dan Organisasi Publik–Teori dan Aplikasinya)." *Yayasan DPI* (2023).

Iskandar, Iskandar. "Dakwah pada Masyarakat Perkotaan." *Komunida* 5.1 (2015): 31-60.

Muadi, Sholih, M. H. Ismail, and Ahmad Sofwani. "Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik." *JRP (Jurnal Review Politik)* 6.2 (2016): 195-224.

NEGARA, BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI. "Ilmu administrasi negara." (2012).

Sommaliagustina, Desi. "Implementasi otonomi daerah dan korupsi kepala daerah." *Journal of Governance Innovation* 1.1 (2019): 44-58.

C. Internet

Hamdi, Wibawa, Nugroho, Mulyd. 2014. Tentang Teori Implementasi Kebijakan. Diunduh 15 November 2024
https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file%205.pdf

Ridwan HR. “Hukum administrasi Negara”,(Jakarta: Rajawali Pers2016, cet: XII),
h.25. Diunduh pada 27 November 2024
<https://repository.uinbanten.ac.id/8340/5/BAB%20III.pdf>

Suparto. Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. (19) PROSIDING SEMNAS UMRAH (OTDA 2017).
Diunduh pada 27 November 2024
<https://repository.uir.ac.id/841/1/%2819%29%20PROSIDING%20SEMNAS%20UMRAH%20%28OTDA%202017%29%20.pdf>

D. Undang-Undang

Undang Undang RI No. 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.